

**ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TARIF
PAJAK PENGHASILAN SESUAI UU NO. 36
TAHUN 2008 TERHADAP PRAKTIK *EARNINGS*
MANAGEMENT SEBAGAI MOTIVASI
PENGHEMATAN PPh BADAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ENDIN DWI WORO WIDYAWANTI

NIM. 12030110141054

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Endin Dwi Woro Widyawanti

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141054

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN
TARIF PAJAK PENGHASILAN SESUAI
UU NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP
PRAKTIK *EARNINGS MANAGEMENT*
SEBAGAI MOTIVASI PENGHEMATAN
PPh BADAN**

Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 24 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

(Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.)

NIP.19650513 199403 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Endin Dwi Woro Widyawanti

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141054

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN
TARIF PAJAK PENGHASILAN SESUAI
UU NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP
PRAKTIK *EARNINGS MANAGEMENT*
SEBAGAI MOTIVASI PENGHEMATAN
PPh BADAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal..... 2014

Tim Penguji

1. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. H. M. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Endin Dwi Woro Widyawanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN SESUAI UU NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP PRAKTIK *EARNINGS MANAGEMENT* SEBAGAI MOTIVASI PENGHEMATAN PPh BADAN**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 8 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

(Endin Dwi Woro Widyawanti)

NIM : 12030110141054

ABSTRACT

This study aims to examine the differences of firm's discretionary accrual whether before and after corporate income tax rate changes according to "UU No. 36 Tahun 2008", from 30% to 28% in year 2009, and 25% in year 2010 with 5% added incentives for the firms which "go public" and deposited stock as minimal 40%. Over that, this study also aims to analyze how practical of earnings management by firms before and after corporate income tax rate changes for saving on taxes. The research samples were 64 manufacturing sector companies which listed in Indonesia Stock Exchange in periods 2008-2010.

The analysis method in this study uses test different T-test and multiple regression analysis. Test different T-test uses paired sample T-test to examine whether there's significant differences of discretionary accrual at before and after corporate income tax rate decreases. While paired sample T-test is used to examine how practical of earnings management by profit firms in responding to these corporate income tax rate decreases with discretionary accrual approach.

The results of this research showed that in years 2009 and 2010 is proved that sample firms do the practical of earnings management by delaying the reporting income in year 2009 and bestow that income to year 2010 for getting more save on taxes. Over that, the practical of earnings management by firms in responding corporate income tax rate decreases were influenced by tax incentives, there was tax planning, and non tax incentives, there were earnings pressure and earnings bath.

Key-words: discretionary accrual, earnings management, tax incentives, and non tax incentives.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat *discretionary accrual* perusahaan antara sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU No. 36 tahun 2008, dari 30% menjadi 28% di tahun 2009, dan 25% di tahun 2010 dengan tambahan insentif sebesar 5% bagi perusahaan yang telah *go public* dan menyetorkan sahamnya minimal sebesar 40%. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik *earnings management* yang dilakukan oleh perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan badan guna menghemat beban pajak perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 64 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2010.

Metode analisis penelitian ini menggunakan uji beda t-test dan analisis regresi berganda. Uji beda t-test menggunakan *paired sample t-test* untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan diberlakukan. Sedangkan uji regresi berganda digunakan untuk menguji bagaimana praktik *earnings management* perusahaan yang memperoleh laba dalam merespon pemberlakuan penurunan tarif pajak tersebut dengan menggunakan pendekatan *discretionary accrual*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan 2010 terbukti perusahaan sampel melakukan praktik *earnings management* dengan menunda pelaporan laba di tahun 2009 dan menggeser laba tersebut ke tahun 2010 untuk memperoleh penghematan pajak yang lebih besar. Selain itu, praktik *earnings management* perusahaan dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu *tax planning* (perencanaan pajak) dan insentif non pajak, yaitu *earnings pressure* dan *earnings bath*.

Kata kunci: *discretionary accrual*, *earnings management*, insentif pajak, insentif non pajak.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar”

(Innallaha ma'ashabirin)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyiroh: 6-8)

“Life is like riding a bike. In order to stay balanced, you've got to keep moving”

-Albert Einstein-

Jangan meragukan kemampuanmu.. jangan pernah putus asa untuk raih suksesmu. Optimis! Sesulit apapun yang kamu hadapi, slalu katakan kamu bisa☺

-Endin Woro-

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, kakak dan adikku terkasih

Sahabat, teman, serta orang terdekat yang aku sayangi

Kalian adalah motivasi dan penyemangatku untuk menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih atas segala bantuan, dukungan serta doa kalian untukku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarukatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, dan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan sesuai UU No. 36 Tahun 2008 terhadap Praktik *Earnings Management* sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan**”. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, maupun dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. selaku Dosen Wali dari penulis yang senantiasa memberikan arahan serta dukungan selama penulis menjalani proses belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membagikan pengalaman, serta memberikan motivasi belajar selama ini.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu dan memberikan kelancaran proses administrasi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak AIPDA Bondan Hery Tunggal dan Ibu Nor Indrani yang sangat menginspirasi dan memotivasi hidup penulis, senantiasa memberikan curahan kasih sayang begitu besar, selalu mendidik penulis agar menjadi seorang yang selalu rendah hati, memberikan semangat serta dukungan moril maupun materiil hingga penulis menjadi seorang Sarjana (S1) Ekonomi.
8. Kakakku tersayang Tatang Anggoro Putro, S.K.M. dan adikku terkasih Endin Tri Woro Noora Junita atas kasih sayang, dorongan serta semangat yang begitu besar kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan menjadi seorang Sarjana (S1) Ekonomi.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat, serta doa demi kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku terbaik selama kuliah yang selalu bersama dalam menjalani proses perkuliahan dari titik nol yang awalnya kita masih remaja hingga sekarang semakin dewasa berkembang dengan pemikiran serta opini kita yang berbagai macam, Diana Hariani sahabat berbagi suka duka kuliah selama ini yang selalu setia bersama

baik di kelas maupun di kos, Nandha Rakhmalia sahabat berbagi keluh kesah hidup berbalut kasih sayang, Dumanika Rizky sahabat yang dengan kepolosan dan apa adanya membuat setiap kebersamaan kita penuh canda tawa menggemaskan, dan Hanifah K. Ulfasari sahabat berbagi pengalaman hidup yang selalu memberikan perhatian di kala sedih maupun bahagia.

11. Sahabatku tersayang, Dara Pramitha yang selama ini selalu menjadi pendengar setia curahan hati penulis di kala susah senang, sahabat berbagi tangis dan tawa yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku terkasih, Ratna Fenyami, Adhita Azma, dan Rifkie Ferriana yang sejak masuk SMP sampai sekarang paling setia menyisihkan sedikit waktu untuk kumpul bersama, berbagi susah senangnya hidup meskipun kita menuntut ilmu di kota-kota yang berbeda.
13. Kak Ninda Nadya yang bukan sekedar teman kost namun juga teman bertukar pikiran yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
14. Teman-teman KKN Tim II 2013 khususnya teman-teman KKN Desa Baturono, Fiya, Sabrina, Dwi, Frena, Fierdha, Vedy, Mukhlis, Faustinus, Guruh yang dapat menjadi teman baik sekaligus tim yang solid, penuh rasa kebersamaan saat suka duka menerpa di kala proses KKN.

15. Teman-teman Akuntansi Reguler II angkatan 2010 khususnya kelas B atas segala ukiran cerita indah, dukungan, kerjasama, dan motivasi yang membangun semangat keberhasilan bersama dari awal semester 1 sampai semester 8 ini.
16. Mas Andito yang meskipun sedang bertugas di luar Jawa, namun melalui media komunikasi dapat meluangkan waktunya menemani penulis saat menyusun skripsi hingga larut malam di minggu-minggu terakhir penyusunan skripsi.
17. Mas Bakti, Cik Riama, dan Angga yang telah memberi semangat, doa, dan selalu menanyakan kapan lulus.
18. Semua pihak yang telah berkontribusi membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan suatu sumbangsih bagi Universitas Diponegoro khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar skripsi ini menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarukatuh

Semarang, 15 Maret 2014

Penulis,

Endin Dwi Woro Widyawanti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii

No table of contents entries found.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbedaan Tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, dan 2008 untuk Wajib Pajak Badan.....	14
Tabel 2.2 Ikhtisar Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 4.1 Rincian Distribusi Sampel Perusahaan	54

No table of contents entries found.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 1	28
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 2	29
Gambar 4.1 Hasil Analisis Uji P-P Plot of Regression Standardized Residual	61

No table of contents entries found.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam ekonomi perusahaan. Laporan keuangan memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya, yaitu *stakeholders* dan manajer perusahaan itu sendiri. Dalam pengelolaannya, perusahaan memperhatikan setiap poin yang dianggap penting atau patut untuk diperhatikan. Salah satunya adalah pembebanan pajak penghasilan atas laba yang diperoleh.

Pajak menjadi salah satu alasan perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan untuk memperkecil pembebanan pajak penghasilan yang tinggi. Perilaku manajemen yang seperti inilah yang dikenal dengan istilah *earnings management*, di mana perusahaan merekayasa laporan keuangan untuk meminimalkan laba bersih yang dilaporkan agar beban pajak menjadi relatif rendah. Sehingga perusahaan tetap dapat bertanggungjawab untuk membayar kewajibannya kepada negara, karena mengingat pajak adalah pendapatan utama yang memberi kontribusi tinggi untuk membiayai pembangunan negara. Sektor perpajakan mempunyai proporsi lebih dari 50% dari penerimaan APBN. Hal ini memicu berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak secara

optimal, salah satunya dengan melakukan perubahan undang-undang perpajakan.

Pada tahun 2008, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merevisi beberapa undang-undang perpajakan. Revisi tersebut meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Reformasi pajak penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan sekarang UU No. 36 tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi perpajakan dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global yang sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional agar lebih stabil. Maka melalui UU No. 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah memberikan insentif atau keringanan kepada pengusaha dalam membayar pajak. Insentif yang dimaksud adalah memberlakukan sistem tarif tunggal (*single tax*) dengan menurunkan tarif pajak penghasilan menjadi 28% mulai berlaku di tahun fiskal 2009, sedangkan di tahun fiskal 2010 menjadi 25%. Tarif PPh ini masih

akan dikurangi sebesar 5% apabila wajib pajak badan tersebut adalah wajib pajak badan dalam negeri dengan beberapa syarat: (1) berbentuk perseroan terbuka dengan minimal 40% dari sahamnya disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor paling sedikit dimiliki oleh 300 (tiga ratus) pihak, (2) peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penurunan tarif pajak badan tersebut semakin memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *earnings management* dalam rangka penghematan pajak penghasilan perusahaan di tahun sebelum diberlakukannya UU PPh yang baru agar semakin kecil. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Menurut akuntansi hal ini masih dapat diterima karena akuntansi menganut prinsip *accrual basis* yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang dilakukan pada periode yang seharusnya pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas dari pendapatan atau beban yang bersangkutan.

Momen penurunan tarif pajak dipandang oleh perusahaan sebagai kesempatan untuk menghemat pajak penghasilannya, sehingga perusahaan cenderung akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya di tahun sebelum penurunan tarif pajak badan agar labanya menjadi rendah.

Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda. Perusahaan dengan komponen akrual yang besar memiliki peluang untuk merekayasa laporan keuangannya dan kemungkinan akan memperoleh penghematan pajak lebih besar dibanding dengan perusahaan dengan komponen akrual kecil. Kebijakan atau metode akuntansi untuk perilaku *earnings management* seperti ini dapat dilakukan dengan pendekatan rekayasa *discretionary accrual*.

Beberapa penelitian mengenai hubungan penurunan tarif pajak penghasilan badan dengan praktik *earnings management* perusahaan, antara lain Guenther (1994) di Amerika Serikat, dengan *Tax Reform Act 1986*, yang membuktikan bahwa *current accruals* berhubungan positif dengan tingkat hutang dan berhubungan negatif dengan ukuran perusahaan, namun tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Penelitian yang dilakukan oleh Yamashita dan Otagawa (2007) di Jepang, dengan *Tax Rate Reduction in the Late 1990s*, yang membuktikan bahwa *discretionary accrual negative* secara signifikan untuk periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak yang baru. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Jepang mengatur laba rugi perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak penghasilannya.

Sedangkan di Indonesia, penelitian mengenai hubungan penurunan tarif pajak penghasilan badan dengan praktik *earnings management* perusahaan, yaitu Amanda Husni (2010) yang meneliti apakah manajer akan

berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum diberlakukannya UU Perpajakan tahun 2008 yang efektif per 1 Januari 2009. Namun hasilnya belum dapat membuktikan adanya rekayasa yang dilakukan oleh manajemen dalam merespon perubahan UU Perpajakan tersebut. Maxson Wijaya dan Dwi Martani (2011) yang meneliti mengenai manajemen laba melalui manipulasi aktivitas akrual sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya Fitriyani, Maiyarni, dan Gowon (2012) yang menganalisis perbedaan *earnings management* sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Perpajakan yang baru tersebut.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Maxson Wijaya dan Dwi Martani (2011) agar dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai praktik *earnings management* perusahaan melalui rekayasa *discretionary accrual* dengan beberapa pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya sebagai respon terhadap perubahan tarif pajak penghasilan yang baru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model operasional yang berbeda dengan jurnal acuan. Penulis menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow, *et al.* (1995) untuk menghitung nilai *discretionary accrual*. Model ini memisahkan *discretionary accrual* dan *nondiscretionary accrual*, serta mengurangi asumsi bahwa komponen *nondiscretionary accrual* adalah konstan.

Demikian *earnings management* yang dianggap sebagai langkah yang dilakukan perusahaan dalam merespon adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU No. 38 Tahun 2008 yang mendorong penulis

untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik *earnings management* perusahaan dengan menguji nilai akrualnya sebagai suatu motivasi penghematan pajak penghasilan perusahaan. Dari uraian latar belakang di atas lah yang melatarbelakangi penulis mengambil judul skripsi “**ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN SESUAI UU NO.36 TAHUN 2008 TERHADAP PRAKTIK EARNINGS MANAGEMENT SEBAGAI MOTIVASI PENGHEMATAN PPh BADAN**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) program studi akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan tarif pajak penghasilan badan yang terjadi pada tahun 2009 dan 2010 yang telah dijelaskan di atas, sangat memungkinkan dilakukannya *discretionary accrual* sebagai bagian dari praktik *earnings management* yang dilakukan perusahaan terhadap laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin membayar beban pajak yang relatif kecil. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, serta masih adanya perbedaan hasil penelitian mengenai hal ini, maka muncul beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *earnings management* dengan menguji *discretionary accrual* sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan?

2. Apakah praktik *earnings management* yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak dan/atau insentif non pajak?
3. Apakah perusahaan memiliki jenis insentif untuk menunda penghasilannya ke periode yang tarif pajaknya lebih rendah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan melakukan praktik *earnings management* (melalui pendekatan *discretionary accrual*) sebagai suatu motivasi penghematan pajak penghasilan perusahaan terhadap perubahan tarif pajak penghasilan yang menjadi lebih rendah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam hal ini *earnings management* dipengaruhi oleh adanya insentif pajak dan/atau insentif non pajak karena pada dasarnya insentif tersebut berkaitan dengan laba kena pajak perusahaan (*taxable income*).

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai landasan teori untuk penelitian selanjutnya tentang *earnings management*.
 - b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama

mengenai studi manajemen laba untuk mengakrualkan pendapatan dan beban perusahaan pada periode di mana tarif pajak menjadi lebih rendah untuk meminimalkan beban pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil analisis dapat dijadikan sebagai acuan manajer dalam mengambil suatu keputusan berkaitan dengan beban pajak dan/atau pendapatan kena pajak bila terjadi perubahan tarif pajak penghasilan badan sewaktu-waktu dengan melihat komponen akrual labanya.
- b. Bagi pembuat kebijakan UU Perpajakan agar mengetahui bahwa adanya perubahan tarif pajak penghasilan tersebut direspon secara tepat atau tidak oleh wajib pajak badan, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi perilaku wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara yang sebagian besar dari pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang sedang dikaji, antara lain: teori keagenan, wajib pajak badan, perubahan tarif pajak penghasilan badan menurut UU Perpajakan di Indonesia, konsep *earnings management*, insentif pajak, insentif non pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data yang meliputi uji statistik deskriptif, uji beda T-test, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini menjelaskan tentang penjabaran teori dan argumentasi yang disusun berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang akan diteliti. Dalam landasan teori ini berisi: *agency theory* (teori keagenan), wajib pajak badan, perubahan tarif pajak penghasilan badan, *earnings management* (manajemen laba), *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban), insentif pajak, insentif non pajak.

2.1.1 Agency Theory (teori keagenan)

Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan gambaran mengenai konsep *earnings management* dapat dikaitkan dengan *agency theory* (teori keagenan). Jensen and Meckling (1976), menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan keagenan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*), dimana wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* telah diatur dalam kontrak kerja bersama untuk pengambilan keputusan atas nama *principal*.

Eisenhardt (1989) beropini bahwa teori keagenan dapat menggunakan tiga asumsi sifat manusia berikut: (1) pada umumnya manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki keterbatasan daya pikir tentang persepsi masa depan

(*bounded rationality*), dan (3) manusia cenderung menghindari risiko (*risk averse*). Maka jika didasarkan pada ketiga asumsi dasar manusia tersebut, seorang manajer sebagai manusia cenderung akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya (*opportunistic*). Jadi jika dianalogikan, perusahaan akan bertindak sesuai apa yang diyakini harus dilakukan dengan benar demi kelangsungan bisnisnya namun dengan cara pengelolaan manajemen di bawah kendali seorang manajer perusahaan (*agent*) itu sendiri.

Terkadang terjadi ketidaksesuaian informasi antara *agent* dan *principal*, karena *agent* memiliki lebih banyak atau bahkan keseluruhan informasi mengenai internal perusahaan yang mana tidak dimiliki oleh *principal*. Ketidaksesuaian tentang informasi tersebut dinamakan sebagai asimetri informasi. Hal ini yang mengakibatkan adanya asumsi bahwa masing-masing pihak bertindak untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri sehingga mengakibatkan munculnya peluang bagi *agent* untuk merahasiakan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* karena menurut *agent* memang *principal* tidak harus mengetahui beberapa informasi tersebut. Di samping itu, juga dapat memotivasi pihak manajemen (*agent*) untuk menyajikan informasi pada laporan keuangan yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terlebih apabila informasi-informasi tersebut berhubungan dengan suatu pengukuran kinerja manajemen atau perusahaan (*agent*).

2.1.2 Wajib Pajak Badan

Berbicara mengenai pajak penghasilan badan tentunya tidak terlepas dari gambaran mengenai wajib pajak badan. Menurut UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak badan yaitu yang memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

Pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan suatu pajak penghasilan yang terutang oleh badan, yang diperoleh dari pengenaan tarif pajak atas laba kena pajak suatu badan dan wajib disetor kepada negara pada periode waktu yang telah ditentukan sebagai wujud kewajiban suatu wajib pajak. Di dalam UU tersebut di atas, penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto badan.

2.1.3 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pemberlakuan tarif pajak, salah satunya adalah tarif pajak penghasilan. Perubahan tarif pajak penghasilan terbaru di Indonesia tercantum di dalam UU No.36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Pada PMK-238/PMK.03/2008 terdapat beberapa aturan mengenai penurunan tarif pajak. Aturan-aturan tersebut di antaranya:

1. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT (Perseroan Terbuka) dapat memperoleh potongan tarif PPh sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi PPh WP Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
2. Penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada wajib pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud diatas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh wajib pajak badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

5. Waktu enam bulan sebagaimana dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Tabel 2.1
Perbedaan tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, dan 2008
untuk Wajib Pajak Badan

UU No.7/1983 PKP dan Tarif	UU No.10/1994 PKP dan Tarif	UU No.17/2000 PKP dan Tarif	UU No.36/2008 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15%	PKP s/d 25.000.000 = 10%	PKP s/d 50.000.000 = 10%	Tarif WP (Wajib Pajak) Badan & Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah 28% (ditetapkan pada tahun 2009), dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010), dan bisa turun sebesar 5% untuk WP berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan/atau lebih dari keseluruhan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25%	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15%	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15%	
PKP diatas 50.000.000 = 35%	PKP diatas 50.000.000 = 30%	PKP diatas 100.000.000 = 30%	

Sumber : Undang-Undang Perpajakan,PMK Tahun 2008
(www.pajak.go.id)

2.1.4 Earnings Management (manajemen laba)

Earnings management (manajemen laba) sering dikenal sebagai suatu kegiatan rekayasa laba yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) dengan cara mengendalikan komponen-komponen dalam laporan keuangan guna kepentingan manajerial yang mana perilaku manajemen ini memang diatur dalam PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Ada 2 (dua) cara untuk memahami *earnings management* (Sari,2005), yaitu:

1. Memandang *earnings management* sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, utang, dan politik.
2. Memandang *earnings management* dari perspektif kontrak efisien, yang artinya *earnings management* memberi fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Scott (2003:369) mendefinisikan *earnings management* sebagai:

”the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective.”

Arti dalam bahasa Indonesia:

“suatu pilihan manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.”

Menurut Scott (2003:383), beberapa jenis tindakan manajer dalam *earnings management* yaitu sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru. Manajemen mencoba mengalihkan *expected future cost* (perkiraan biaya yang akan datang) ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa yang akan datang. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan *clear the desk*, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

2. *Income minimization*

Tindakan ini hampir mirip dengan "*taking a bath*", tetapi lebih sedikit ekstrim, karena dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya

iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (litbang), serta hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi.

3. *Income maximization*

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi, guna menaikkan laba masa kini untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan memaksimalkan pendapatan.

4. *Income smoothing*

Pola ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Dengan kata lain, manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

2.1.5 *Matching of Cost with Revenue* (memadankan antara pendapatan dan biaya)

Konsep *matching of cost with revenue* digunakan untuk memadankan antara pendapatan dan biaya hingga diperoleh nilai laba atau rugi dalam laporan laba-rugi (*income statement*) perusahaan. Laba diperoleh dari penghitungan selisih antara pendapatan dan biaya yang

menunjukkan sisa positif, sedangkan rugi apabila menunjukkan sisa negatif (minus). Laba atau rugi perusahaan biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Salah satunya adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkepentingan terhadap penetapan regulasi tentang pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan. Adanya konsep *matching of cost with revenue* ini justru memotivasi perusahaan (manajemen) memanfaatkan konsep akrual untuk melakukan manajemen laba guna tujuan-tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh perusahaan.

Jenis akrual dibagi menjadi dua, yaitu *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan suatu pilihan kebijakan manajemen dengan cara pengakuan terhadap akrual laba atau beban yang bebas dan tidak diatur. Sedangkan *non discretionary accrual* adalah suatu pengakuan akrual laba yang wajar dan tunduk terhadap suatu standar atau prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU), sehingga apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak wajar, sehingga *non discretionary accrual* tidak relevan dengan objek penelitian ini. Maka dari itu, jenis akrual yang digunakan dalam penelitian ini adalah *discretionary accrual* karena merupakan akrual yang tidak normal dan pilihan metode akuntansi yang relevan terhadap praktik *earnings management* (manajemen laba).

2.1.6 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak untuk dapat memperkecil besarnya beban pajak yang wajib dibayar. Menurut Barry Spitz (1983) dalam Suandy (2003), ada empat jenis insentif pajak yaitu: (1) pengecualian dari pengenaan pajak, (2) pengurangan dasar pengenaan pajak, (3) pengurangan tarif pajak, (4) penangguhan pajak. Insentif pajak mampu memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba sebagai bentuk penghematan pajak, sehingga dapat disebut sebagai manajemen pajak.

Menurut Sophar Lombantoran (1999) dalam Suandy (2003), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetap jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Suandy (2003), manajemen pajak dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Tax planning merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan suatu usaha dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan lebih hemat yang dilakukan secara legal dengan berlandaskan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakan yang harus sesuai dengan regulasi perpajakan.

3. Pengendalian pajak (*tax controlling*)

Langkah terakhir, pengendalian pajak berfungsi untuk memastikan bahwa manajemen laba yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan pembayaran pajak sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Mohammad Zain (2008), perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, untuk mengendalikan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan pajak yang akan dibayar ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*), bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Untuk mendapatkan pajak yang lebih kecil maka perusahaan tidak harus melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, namun melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan perusahaan melalui aktivitas perusahaan.

Dapat juga dijelaskan secara singkat bahwa manajemen pajak adalah suatu upaya manajemen dalam berperan melakukan penghematan pajak secara legal dengan tetap memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan adalah *tax planning*

(perencanaan pajak) karena proses dari penghematan pajak terutang berfokus pada perencanaan pajak itu sendiri.

2.1.7 Insentif Non Pajak

Ada beberapa pendekatan oleh para peneliti ahli yang membahas tentang insentif non pajak, di antaranya:

1. Guenther (1994) dalam Wijaya dan Martani (2011), menemukan bukti empiris bahwa jenis insentif non pajak berupa ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif dan kepemilikan manjerial justru tidak mempunyai hubungan dengan *discretionary current accrual*, namun *discretionary current accrual* tersebut dapat berhubungan positif terhadap insentif non pajak tingkat hutang.
2. Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011), menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) lebih tertarik untuk mengurangi *discretionary accrual* untuk mendapatkan keuntungan perpajakan. Di mana laba perusahaan dapat dikurangi dengan *earnings pressure* guna melakukan *income smoothing*, yaitu memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba ke periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah (Scott, 2000).
3. Namun, ada pula penelitian Yin dan Cheng (2004) dalam Subagyo dan Oktavia (2010), mengungkapkan bahwa insentif non pajak berupa *earning pressure*, tingkat hutang, *earning bath*, ukuran perusahaan,

dan kepemilikan manjerial dapat mempengaruhi nilai *discretionary accrual* perusahaan.

Bermula dari masih terdapatnya perbedaan tentang penemuan penelitian tentang hal ini, maka jenis-jenis insentif non pajak tersebut penulis gunakan dalam uji penelitian ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang adanya manajemen laba terkait dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan yang ditentukan oleh pemerintah, khususnya tarif pajak penghasilan badan, di antaranya dilakukan oleh beberapa peneliti di bawah ini:

1. David A. Guenther (1994) melakukan pengujian pengaruh publikasi TRA (*Tax Reform Act*) pada tahun 1986 terhadap perusahaan-perusahaan di United States dengan memfokuskan pada total akrual. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan bahwa penurunan pajak (TRA 1986) mampu mempengaruhi kebijakan akrual perusahaan. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh tidak diperhitungkannya keterbatasan manajer dalam melakukan rekayasa akrual.
2. Lilis Setiawati (2001) menganalisis apakah terdapat perilaku manajemen laba dengan merekayasa akrual dalam merespon perubahan UU PPh tahun 1994 yang efektif per 1 Januari 1995 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan untuk menurunkan laba tahun 1994 dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak pada tahun yang bersangkutan.

3. Jennifer Yin dan Agnes Cheng (2004) menguji apakah terjadi manajemen laba pada *profit firm* dan *loss firm* saat terjadi penurunan tarif pajak badan. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam menanggapi perubahan tarif pajak di United States tersebut. Hasil penelitiannya ternyata mampu membuktikan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) lebih tertarik untuk mengurangi *discretionary accrual* demi mendapatkan keuntungan perpajakan.
4. Balashingham Balachandran, et al.(2007) menguji pengaruh pengenalan sistem pajak perolehan dividen pada tahun 1987 dan pengurangan tarif pajak badan pada tahun 1988 di Australia. Hasil penelitiannya konsisten dengan yang diharapkan, dimana perusahaan telah mengatur penurunan laba pada tahun sebelum implementasi sistem perolehan dividen dan tahun sebelum pengurangan tarif pajak badan, serta sebaliknya pada tahun pertengahan setelah implementasi pengurangan tarif pajak badan.
5. H. Yamashita dan Otagawa Kazuhisa (2007) menguji apakah perusahaan di Jepang mengatur nilai buku penghasilan (*book income*) untuk menanggapi penurunan tarif pajak perusahaan. Hasil penelitiannya ditemukan bukti empiris bahwa ada pengurangan *discretionary accrual* untuk tahun sebelum penurunan tarif pajak. Ini menunjukkan perusahaan Jepang mengatur pendapatan akuntansi mereka untuk meminimalkan biaya pajak.

6. Amanda Husni (2010) menguji apakah dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008 yang efektif per 1 Januari 2009, akan terdapat indikasi manajer akan menunda pengakuan laba suatu periode sebelum dikeluarkannya tarif baru yang lebih rendah. Ternyata hasil penelitiannya belum dapat membuktikan bahwa manajemen melakukan rekayasa laba terhadap perubahan UU Perpajakan tsb.
7. Subagyo dan Octavia (2010) melakukan pengujian pada perusahaan manufaktur pada periode 2008-2009 tentang manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak badan di Indonesia, dan menguji apakah manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut dimotivasi oleh insentif pajak ataukah non pajak. Hasil penelitian itu membuktikan bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba untuk merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia hanya perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) dan dipengaruhi oleh insentif pajak serta insentif non pajak. Sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak.
8. Maxson Wijaya dan Dwi Martani (2011) menganalisis apakah perusahaan akan melakukan praktik manajemen laba dalam merespon penurunan tarif pajak dari 30% menjadi 28%. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak tersebut, baik itu perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) ataupun mengalami kerugian (*loss firm*), serta dipengaruhi juga oleh

insentif pajak maupun non pajak dalam memanipulasi labanya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.

9. Dewi Fitriyani dkk. (2012) menganalisis perbedaan *earnings management* sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa perbedaan *earnings management* yang ditunjukkan dengan nilai *discretionary accrual* pada periode sesudah pemberlakuan UU No. 36 Th. 2008 lebih tinggi daripada periode sebelum UU tersebut diberlakukan.

Beberapa ikhtisar penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Ikhtisar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	David A. Guenther (1994)	<i>Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act</i>	Gagal untuk membuktikan bahwa penurunan pajak (TRA 1986) mampu mempengaruhi kebijakan akrual perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak diperhitungkannya keterbatasan manajer dalam melakukan rekayasa akrual.
2.	Lilis Setiawati (2001)	Rekayasa Akrual untuk Meminimalkan Pajak	Gagal untuk membuktikan adanya perilaku perusahaan menurunkan laba tahun 1994 dengan tujuan memperoleh penghematan pajak pada tahun yang bersangkutan.

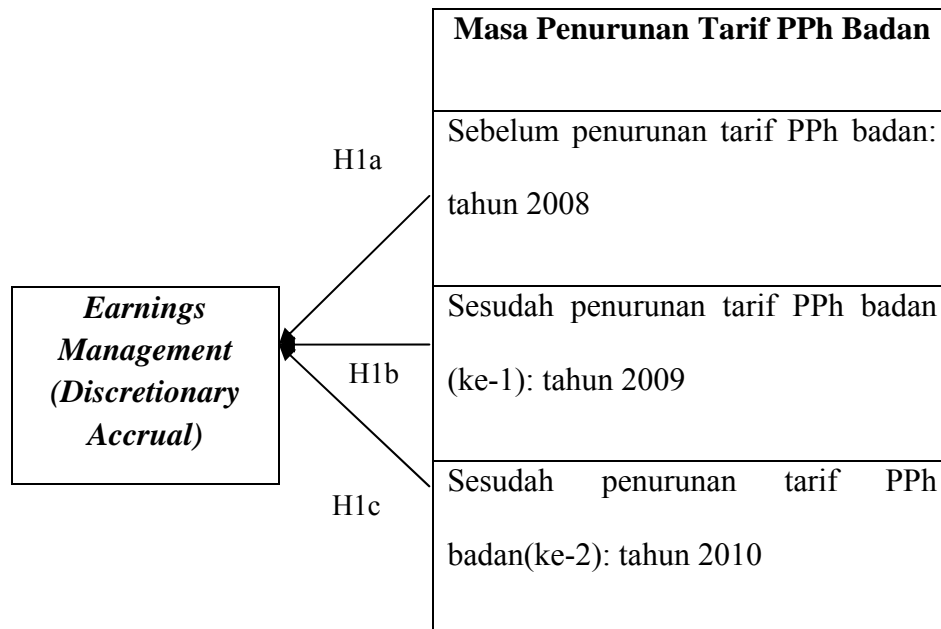
3.	Jennifer Yin dan Agnes Cheng (2004)	<i>Earnings Management of Profit Firms and Loss Firms in Response to Tax Rate Reductions</i>	Berhasil menemukan bukti empiris bahwa perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>) lebih tertarik untuk mengurangi <i>discretionary accrual</i> demi mendapatkan keuntungan pajak.
4.	Balashingham Balachandran, et al. (2007)	<i>Earnings Management in Response to The Corporate Tax Law Changes Evidence from Australia</i>	Terbukti perusahaan mengatur penurunan laba pada tahun sebelum implementasi sistem perolehan dividend an tahun sebelum pengurangan tarif pajak badan, serta sebaliknya di tahun pertengahan setelah implementasi pengurangan tarif pajak badan.
5.	H. Yamashita dan Otogawa Kazuhisa (2007)	<i>Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in The Late 1990s?</i>	Ditemukan bukti empiris adanya pengurangan <i>discretionary accrual</i> untuk tahun sebelum penurunan tarif pajak. Ini menunjukkan perusahaan Jepang mengatur pendapatan akuntansi mereka untuk meminimalkan biaya pajak.
6.	Amanda Husni (2010)	Indikasi Manajemen Laba sebagai Respon terhadap Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008	Belum dapat membuktikan bahwa manajemen melakukan rekayasa laba terhadap perubahan UU pajak yang terjadi.
7.	Subagyo dan Octavia (2010)	Manajemen Laba sebagai Respon atas Perubahan	Terbukti bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam

		Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia	rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia hanya perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>) dan dipengaruhi oleh insentif pajak serta insentif non pajak. Sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian (<i>loss firm</i>) hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak.
8.	Maxson Wijaya dan Dwi Martani (2011)	Praktik Manajemen Laba Perusahaan dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak sesuai UU No.36 Tahun 2008	Terbukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia, baik perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>) ataupun mengalami kerugian (<i>loss firm</i>), serta dipengaruhi juga oleh insentif pajak maupun non pajak dalam memanipulasi labanya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.
9.	Dewi Fitriyani, Reka Maiyarni, dan Muhammad Gowon (2012)	Analisis Perbedaan <i>Earnings Management</i> Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	Membuktikan adanya perbedaan <i>earnings Management</i> yang ditunjukkan dengan nilai <i>discretionary accrual</i> , pada periode sesudah pemberlakuan UU No. 36 Th. 2008 lebih tinggi daripada periode sebelum UU tersebut diberlakukan.

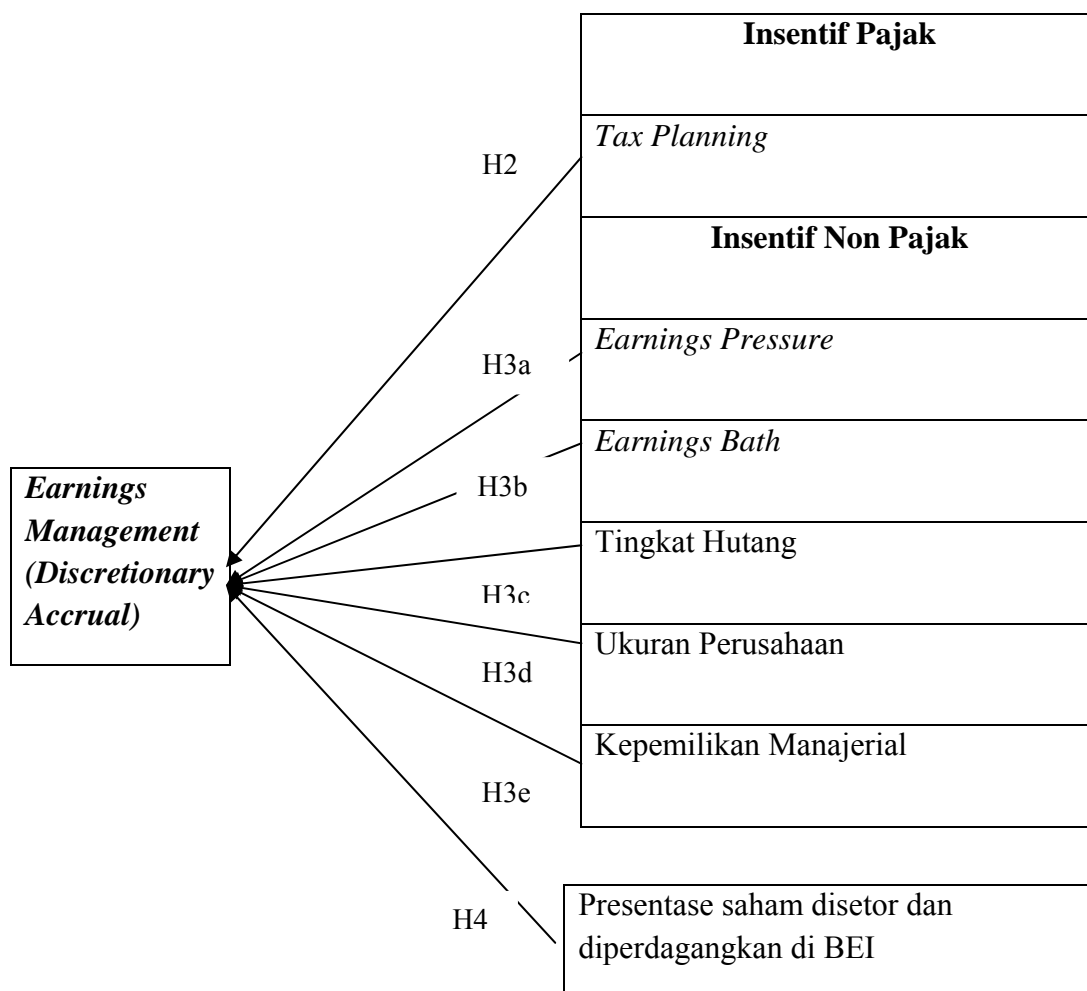
2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan mengenai landasan teori dan beberapa konsep pendukung lainnya, penulis menyusun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran 1



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran 2



Gambar 2.1 kerangka pemikiran 1 menjelaskan adanya respon perusahaan terhadap berlakunya UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada tahun 2009 dan 2010 telah terjadi penurunan tarif PPh Badan selama beberapa periode waktu. Penurunan tarif PPh Badan tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi praktik *earnings management* karena tarif yang ditetapkan untuk pajak badan cukup signifikan, yaitu 28% yang efektif di

tahun 2009 dan 25% efektif di tahun 2010. Dari gambar kerangka pemikiran juga dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat tiga periode waktu yang tarif pajaknya berbeda-beda, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010. Penelitian ini akan membuktikan apakah memang terjadi praktik *earnings management* selama beberapa periode waktu tersebut dalam menanggapi perubahan tarif pajak penghasilan di tahun 2009 dan 2010.

Selain menganalisis respon perusahaan terhadap tarif pajak seperti yang dijelaskan di atas, penelitian ini juga meneliti tentang beberapa faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba, di antaranya seperti insentif pajak, insentif non pajak, serta presentase saham perusahaan yang disetor dan diperdagangkan di BEI.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran, dapat diketahui bahwa pada kerangka pemikiran 1 penulis ingin membuktikan apakah sudah terjadi praktik manajemen laba sebelum adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan. Selain itu penulis juga akan membuktikan apakah di tahun 2009 (diberlakukannya tarif pajak baru), perusahaan tetap melakukan manajemen laba atau tidak agar beban pajaknya menjadi semakin kecil. Sehingga rumusan hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H1a : Perusahaan melakukan praktik *earnings management* (di tahun 2008) sebelum penurunan tarif PPh badan.

H1b : Perusahaan melakukan praktik *earnings management* (di tahun 2009) sesudah penurunan tarif PPh badan pertama.

H1c : Perusahaan melakukan praktik *earnings management* (di tahun 2010) sesudah penurunan tarif PPh badan kedua.

Penelitian ini memproksikan insentif pajak dengan *tax planning* (perencanaan pajak) yang merupakan salah satu dari bentuk manajemen pajak. Perusahaan melakukan manajemen pajak untuk mengendalikan pajak penghasilannya guna memastikan apakah langkah yang telah diambil perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan pembayaran pajak juga sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan. Sedangkan *tax planning* (perencanaan pajak) itu sendiri merupakan suatu tindakan pengendalian transaksi terkait dengan tujuan mengefisienkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Jadi dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat memperkecil laba perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan yang berlaku. Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik, cenderung akan mengurangi laba bersih perusahaan guna mendapatkan keuntungan pajak. Semakin besar manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil labanya, maka semakin besar pula perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya. Tindakan manajemen yang dengan sengaja menurunkan atau

menaikkan laba perusahaannya merupakan suatu gambaran dari praktik *earnings management* (manajemen laba). Sehingga dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : *Tax planning* berpengaruh negatif terhadap *discretionary accrual*.

Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011) menerangkan bahwa perusahaan yang labanya melebihi target, penurunan laba yang dilakukan dapat dikurangi dengan *earnings pressure*. Sehingga perusahaan tertarik menggunakan akrual negatif untuk mengurangi pendapatan guna melakukan *income smoothing*. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3a : *Earnings pressure* berpengaruh positif terhadap *discretionary accrual*.

Wijaya dan Martani (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *earnings bath* yang tinggi (perusahaan dengan tingkat ROE rendah) cenderung menggunakan pengurangan *discretionary accrual* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat *earnings bath* yang rendah. Sehingga perusahaan cenderung melakukan *earnings management* guna mencapai tingkat ROE yang rendah. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3b : *Earnings bath* berpengaruh positif terhadap *discretionary accrual*.

Tingkat hutang merupakan salah satu komponen penting di dalam laporan keuangan, karena hutang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam *earnings management* yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satunya penghematan beban pajak perusahaan. Guenther (1994), Watts dan Zimmerman (1986) dalam Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan hutangnya karena bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Perusahaan memperoleh keuntungan dalam pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Sehingga memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba atas hutangnya dengan cara meningkatkan hutang perusahaan. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3c : Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap *discretionary accrual*.

Berdasarkan pemikiran sederhana, ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kategori besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan besar lebih cenderung melakukan *earnings management* (manajemen laba) guna memperkecil laba perusahaan agar terhindar dari beban pajak yang besar. Guenther (1994) dalam Wijaya dan Martani (2011) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik, dengan begitu akan lebih mungkin menggunakan metode akuntansi untuk mengurangi laba bersihnya sehingga

memperoleh beban pajak yang lebih kecil. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3d : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *discretionary accrual*.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, yang berarti pihak manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham atas perusahaan yang dikelolanya. Karena pihak manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham perusahaannya sendiri, maka dapat diperkirakan manajer akan mengambil langkah yang sejalan dengan apa yang diinginkan sebagai pemegang saham, yaitu ingin merasakan manfaat dari setiap keputusan yang diambil. Kepemilikan manajerial yang tinggi, diharapkan dapat memiliki *discretionary accrual* yang negatif sehingga perusahaan memperoleh keuntungan berupa penghematan pajak. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3e : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *discretionary accrual*.

Menurut penetapan tarif pajak yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan tarif pajak badan yang cenderung menurun, yaitu 28% yang efektif di tahun fiskal 2009 dan 25% yang efektif di tahun fiskal 2010. Selain itu, terjadi pengurangan lagi karena adanya penambahan insentif sebesar 5% apabila perusahaan yang telah *go public* memiliki saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI sesuai syarat

minimalnya yaitu 40%. Dengan begitu perusahaan akan termotivasi untuk memanipulasi laba perusahaan guna memperoleh saham setidaknya minimal dari yang disyaratkan agar memperoleh tambahan insentif tersebut untuk mengurangi beban pajak. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Presentase saham disetor dan diperdagangkan di BEI berpengaruh negatif terhadap *discretionary accrual*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).

1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependen (variabel terikat) yang digunakan yaitu *earnings management* (manajemen laba). Untuk membuktikan adanya praktik *earnings management* (manajemen laba), variabel ini diukur menggunakan formula *discretionary accrual*.

2. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) yang digunakan untuk penelitian ini yaitu perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008, insentif pajak berupa *tax planning*, insentif non pajak antara lain *earnings pressure*, *earnings bath*, tingkat hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan presentase saham disetor dan diperdagangkan di BEI.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah definisi operasional ataupun pengertian dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Earnings Management*

Earnings management (manajemen laba) merupakan suatu tindakan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba perusahaannya yang bertujuan untuk menguntungkan pihak manajemen itu sendiri. Sedangkan menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang tidak netral (memihak), dan manajer juga ikut campur tangan untuk menghasilkan keuntungan keuangan bagi pribadinya.

2. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008

Perubahan tarif pajak penghasilan badan yang terjadi di tahun 2008 merupakan suatu perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 yang secara resmi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kini perubahan tarif pajak penghasilan terbaru di Indonesia telah tercantum di dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan PMK-238/PMK.03/2008 tentang beberapa aturan penurunan tarif pajak.

3. *Tax Planning*

Tax planning (perencanaan pajak) merupakan suatu strategi atau langkah yang dilakukan oleh perusahaan (manajemen) untuk meminimalkan beban pajak di tahun berjalan ataupun tahun yang akan datang guna menekan seefisien mungkin beban pajak yang harus

dibayarkan dengan berbagai cara yang tetap memenuhi ketentuan perpajakan (Wijaya dan Martani, 2011).

4. *Earnings Pressure*

Earnings pressure merupakan salah satu cara untuk merespon adanya manajemen laba dengan melakukan *income smoothing*. Hal ini dilakukan karena investor lebih tertarik pada laba perusahaan yang stabil (Wijaya dan Martani, 2011).

5. *Earnings Bath*

Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011) menyatakan peristiwa *earnings bath* ditandai dengan terjadinya laba perusahaan yang kecil, maka manajer tidak akan berusaha meningkatkan total akrualnya, namun akan memperkecil total akrualnya agar mendapatkan kompensasi di masa yang akan datang.

6. Tingkat Hutang

Tingkat hutang merupakan sumber pembiayaan atau pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri ataupun pihak luar.

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat terlihat dari jumlah total aset yang dimiliki perusahaan.

8. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, yang berarti pihak manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham atas perusahaan yang dikelolanya.

9. Presentase Saham Disetor dan Diperdagangkan di BEI

Presentase saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI merupakan presentase atas jumlah saham perusahaan yang telah disetor sekaligus diperdagangkan di BEI, dimana saham tersebut nantinya juga dapat dimiliki oleh umum.

3.2 Pengukuran Variabel

3.2.1 Pengukuran Variabel *Earnings Management*

Di dalam penelitian ini, *earnings management* diukur dengan menggunakan rumus *discretionary accrual* (DAcc). Berbeda dengan jurnal acuan yang penulis gunakan, *discretionary accrual* pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan model Jones (1991) namun yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al (1995). Model ini dirancang untuk mengurangi kesalahan yang ada pada model Jones bila penghitungan *discretionary accrual* diterapkan pada pendapatan. Sedangkan perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang. Dimana piutang muncul ketika pendapatan diperoleh dari suatu penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan

yang benar-benar diterima adalah pendapatan bersih (Dechow et.al, 1995).

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Menghitung total akrual

Menghitung total akrual ini dengan cara mencari nilai selisih antara *net income* (laba bersih) dengan *cash flow operation* (jumlah kas dari kegiatan operasi perusahaan).

$$TAcc_{it} = NInc_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots(a)$$

Keterangan:

$TAcc_{it}$ = Total akrual perusahaan i di tahun t

$NInc_{it}$ = Nilai *net income* (laba bersih) perusahaan i di tahun t

CFO_{it} = Jumlah *cash flow operation* (kas dari kegiatan operasi) perusahaan i di tahun t

b. Menentukan koefisien dari regresi akrual

Karena total akrual juga merupakan penjumlahan antara *nondiscretionary accrual* dan *discretionary accrual*, maka untuk menentukan *nondiscretionary accrual* sekaligus dapat mengetahui koefisien regresinya, dapat dilakukan dengan regresi di bawah ini:

$$\frac{TAcc_{it}}{TAct_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TAct_{it-1}} \right) + \beta_1 \left\{ \frac{(\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it})}{TAct_{it-1}} \right\} + \beta_2 \left(\frac{PPE_{it}}{TAct_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(b)$$

Keterangan:

$TAcc_{it}$ = Total akrual perusahaan i di tahun t

$TAct_{it-1}$ = Total aktiva perusahaan i di tahun t-1

ΔRev_{it} = Selisih antara *revenue* (pendapatan) perusahaan i di tahun t dengan pendapatan tahun t-1

ΔRec_{it} = Selisih antara *receivable* (piutang usaha) perusahaan i di tahun t dengan piutang usaha tahun t-1

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i di tahun t

ε_{it} = *error term* perusahaan i di tahun t

c. Menentukan nilai *nondiscretionary accrual*

Berdasarkan regresi (b) dapat dihasilkan koefisien α_1 , β_1 , dan β_2 yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi nilai *nondiscretionary accrual* dengan persamaan berikut:

$$NDAcc_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TAct_{it-1}} \right) + \beta_1 \left\{ \frac{(\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it})}{TAct_{it-1}} \right\} + \beta_2 \left(\frac{PPE_{it}}{TAct_{it-1}} \right) + \varepsilon \dots\dots\dots(c)$$

Keterangan:

$NDAcc_{it}$ = Nilai *nondiscretionary accrual* pada perusahaan i di tahun t

ε = *error*

d. Menghitung nilai *discretionary accrual*

Dari persamaan-persamaan di atas, diketahui untuk menentukan nilai *discretionary accrual* dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara total akrual pada persamaan (a) dengan nilai *nondiscretionary accrual* pada persamaan (c) yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$DAcc_{it} = \left(\frac{TAcc_{it}}{TAct_{it-1}} \right) - NDAcc_{it} \dots\dots\dots(d)$$

Keterangan:

$DAcc_{it}$ = Nilai *discretionary accrual* perusahaan i di tahun t

3.2.2 Pengukuran Variabel *Tax Planning*

Variabel *tax planning* merupakan proksi dari insentif pajak yang diperkirakan dapat menggambarkan adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan di tahun sebelum perubahan tarif pajak penghasilan yang terbaru diberlakukan, yaitu tahun 2008 (Wijaya dan Martani, 2011). Pengukuran variabel *tax planning* (TAXPLAN) pada penelitian ini menggunakan rumus pada penelitian Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011), yaitu sebagai berikut:

a. Tahun 2008

$$TAXPLAN = \frac{\sum_{2008}(30\%.PTI - CTE)}{TA_{2008}}$$

b. Tahun 2009

$$TAXPLAN = \frac{\sum_{2009}(28\%.PTI - CTE)}{TA_{2009}}$$

c. Tahun 2010

$$TAXPLAN = \frac{\sum_{2010}(25\%.PTI - CTE)}{TA_{2010}}$$

Keterangan:

$TAXPLAN$ = *Tax planning* (perencanaan pajak)

PTI = *Pre-tax income* (pendapatan sebelum kena pajak)

CTE = *Current portion of total tax expense* (beban pajak kini)

TA = *Total asset* (aset total)

3.2.3 Pengukuran Variabel *Earnings Pressure*

Variabel *earnings pressure* (EPRESS) merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya *income smoothing*. Karena menurut Scott (2003:383), *income smoothing* termasuk satu dari beberapa tindakan manajemen untuk melakukan praktik *earnings management* dengan cara mengurangi laba perusahaan pada *earnings pressure* jika diketahui laba perusahaan tidak mencapai target atau minimal sama dengan laba tahun lalu.

Pengukuran variabel EPRESS ini mengikuti rumus pada penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011), yaitu sebagai berikut:

$$EPRESS = \frac{(\text{Laba tahun berjalan} - \text{Laba tahun lalu})}{\text{Total asset awal tahun}}$$

3.2.4 Pengukuran Variabel *Earnings Bath*

Variabel *earnings bath* (ERANK) dalam penelitian ini diprosikan dengan peringkat ROE perusahaan. Jika laba perusahaan kecil, manajer lebih cenderung memperkecil total akrualnya agar mendapatkan kompensasi di masa mendatang. Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai ROE:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Variabel ERANK ini diukur menggunakan variabel dummy. Setelah diketahui hasil dari nilai ROE perusahaan selama periode pengamatan, selanjutnya diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, lalu

diranking. ERANK diberi angka 1 jika menempati posisi kuartil terbawah (20% terbawah), sedangkan lainnya diberi angka 0.

3.2.5 Pengukuran Variabel Tingkat Hutang

Pada penelitian ini, variabel tingkat hutang (DEBT) diukur menggunakan rasio *leverage* yaitu dengan menghitung rasio hutang jangka panjang terhadap total asset di awal tahun. Karena penggunaan angka akuntansi yang mendekati pelanggaran perjanjian persyaratan hutang dengan pemberi pinjaman, memungkinkan perusahaan tidak berniat mengurangi laba bersih laporan keuangan, namun dengan cara memperbesar jumlah hutang perusahaan guna mengurangi pajak penghasilannya.

3.2.6 Pengukuran Variabel Ukuran Perusahaan

Variabel SIZE digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan besar atau kecil. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) dalam penelitian ini, diukur dari rumus berikut ini:

$$SIZE = \ln(\text{nilai total asset})$$

Pengukuran variabel menggunakan logaritma natural dengan tujuan agar memperkecil perbedaan angka yang terlalu jauh dari semua data sampel penelitian yang telah diperoleh. Karena total aset perusahaan memiliki nilai relatif lebih besar daripada variabel lainnya.

3.2.7 Pengukuran Variabel Kepemilikan Manajerial

Variabel kepemilikan manajerial (MGTOWN) menunjukkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan selaku

pemegang saham dari perusahaan yang dikelolanya. Pada penelitian ini, pengukuran variabel MGTOWN menggunakan variabel dummy, dengan ketentuan jika dewan komisaris maupun direksi memiliki kepemilikan saham di perusahaan diberi angka 1, dan jika selain itu diberi angka 0.

3.2.8 Pengukuran Variabel Presentase Saham Disetor dan Diperdagangkan di BEI

Variabel presentase saham disetor dan diperdagangkan di BEI (STOCK) ini juga diukur dengan variabel dummy, angka 0 untuk perusahaan yang memiliki minimal 40% saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI, sedangkan angka 1 untuk perusahaan yang memiliki lebih besar atau sama dengan 40% saham disetor dan diperdagangkan di BEI.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (bersifat kuantitatif), berupa laporan keuangan (auditan) perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2008-2010. Data sekunder tersebut merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, maksudnya adalah yang telah diperoleh, dikumpulkan, kemudian diolah.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan (auditan) perusahaan yang sudah *go public*/terdaftar di BEI dan dapat kita unduh dari alamat website resmi BEI (www.idx.co.id).

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang *go public* dan sahamnya telah terdaftar di BEI pada periode 2008-2010. Sedangkan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, merupakan metode pengambilan sampel non-probabilitas yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan manufaktur yang *go public* dan sahamnya telah terdaftar di BEI pada periode 2008-2010.
2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan (auditan) tahunan secara lengkap dan data dari laporan keuangan tersebut memiliki keterkaitan dengan variabel dalam penelitian selama periode 2008-2010.
3. Perusahaan memperoleh laba di atas Rp. 100.000.000,00 selama periode 2008-2010.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yang diawali dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari terlebih dahulu beberapa literatur yang dibutuhkan untuk penelitian. Selanjutnya melakukan penelaahan terhadap data-data yang dibutuhkan, tentang bagaimana cara memperoleh data, ketersediaan data, dan gambaran untuk mengolah data-data tersebut.

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menguji *mean* (nilai rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum, serta minimum dari data-data yang digunakan dalam penelitian. Uji statistik deskriptif ini, nantinya akan memberikan suatu gambaran tentang semua variabel yang terkait dalam penelitian, yaitu DAcc, TAXPLAN, EPRESS, ERANK, DEBT, SIZE, MGTOWN, dan Presentase saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI.

3.6.2 Uji Beda T-test

Penelitian ini menggunakan jenis uji beda *paired sample T-test* guna menguji apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata *discretionary accrual* sebelum dan sesudah terjadi penurunan tarif PPh badan. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5% ($\alpha = 0,05$) (Ghozali, 2011). Adapun pengambilan keputusannya, sebagai berikut:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima (H_A ditolak), artinya tidak terdapat perbedaan *discretionary accrual* sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif PPh badan baru. Ini berarti perusahaan tidak melakukan praktik *earnings management* guna merespon perubahan tarif PPh badan.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak (H_A diterima), artinya terdapat perbedaan *discretionary accrual* sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif PPh badan baru. Ini berarti perusahaan melakukan praktik *earnings management* guna merespon perubahan tarif PPh badan.

3.6.3 Uji Asumsi Dasar

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi yang dirumuskan serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki data yang dapat terdistribusi normal. Uji normalitas ini dapat diketahui dengan dua cara analisis, yaitu analisis grafik dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan pada analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat hasil analisis *normal probability plot of regression standardized* atau juga dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal dan memiliki ketentuan di bawah ini (Ghozali, 2011):

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik *Kolmogorov-SmirnovZ (1-sample K-S)* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

- a. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
Berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka H_0 diterima.
Berarti data residual terdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada uji model regresi mengalami masalah multikolinearitas (ditemukan adanya korelasi antara variabel independen) atau tidak. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika ditemukan saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (korelasi antar variabel independen sama dengan nol). Untuk uji multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan di bawah ini (Ghozali, 2011):

- a. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi dikatakan baik.
- b. Jika nilai *Tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi dikatakan tidak baik.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dalam model regresi terjadi perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik apabila terjadi homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dianalisis dengan melihat grafik *scatterplot*, dengan dasar analisisnya sebagai berikut (Ghozali, 2011):

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) berarti terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, untuk memperkuat argumen pada hasil grafik *scatterplot* juga dapat dilakukan dengan analisis hasil dari uji glejser. Dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila seluruh variabel independen pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05.

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui dalam model regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi berarti terjadi masalah autokorelasi.

Salah satu untuk mendeteksi adalah dengan Uji Durbin Watson (DW Test). Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut (Ghozali, 2011):

Tabel 3.1
Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicion</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No desicion</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif/negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis linear berganda, diantaranya yaitu uji pengaruh simultan (uji statistik F), uji signifikan parameter individual (uji statistik t), dan uji koefisien determinasi (R^2).

3.6.4.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)

Pada dasarnya, uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya, dengan dasar analisis berikut ini (Gozhali, 2011):

1. Dengan melihat tabel nilai F hitung dan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya H_A ditolak, semua variabel independen dalam penelitian ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sehingga tidak ada pengaruh antara variabel independen (bebas) secara simultan terhadap variabel dependen (terikat).
2. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya H_A diterima, semua variabel independen dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

3.6.4.2 Uji Statistik t

Pada dasarnya, uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen, dengan dasar analisis uji sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Dengan melihat tabel *unstandardized coefficients* dan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya H_A ditolak, tidak ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (terikat).
2. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya H_A diterima, ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (terikat).

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Namun apabila R^2 mendekati angka 1, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2011).

Adapun kelemahan dalam penggunaan koefisien (R^2) yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Maka dari itu penelitian ini menggunakan adjusted R^2 antara 0 dan 1. Apabila nilai adjusted R^2 mendekati 1, maka semakin baik kemampuan model tersebut dapat menjelaskan variabel independen.